

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH KASAR SMA RENDAH DAMPAK DARI TINGKAT KEMISKINAN DAN UPAYA MENGATASINYA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sumarno, SE

Instruktur Muda Balatkop UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Abstrak

Indikator keberhasilan pendidikan berupa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kelompok usia 16-18 tahun baru mencapai 76,41%. Kompleksnya permasalahan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memicu rendahnya APS terutama dalam masalah sosial-ekonomi. Penelitian dengan metode kuantitatif deskriptif ini memprediksikan pengaruh tingkat kemiskinan terhadap APS. Disamping kesadaran Masyarakat di Bangka Belitung untuk sekolah menurun karena pada tahun-tahun tersebut sedang boomingnya Tambang Timah Inkovental yang betapa mudahnya mendapatkan uang. Sementara itu, kurang jumlah sekolah untuk menjangkau masyarakat pedesaan sangat mempengaruhi tingkat APS. Hasil uji regresi menunjukkan, tingkat kemiskinan berpengaruh negatif secara signifikan sebesar 55,33%. Peningkatan kemiskinan diikuti oleh penurunan APS dan sebaliknya. Begitu pula kenaikan jumlah sekolah akan diikuti oleh kenaikan APS.

Kata Kunci: angka partisipasi sekolah kasar SMA, mengurangi angka kemiskinan

Abstract

The indicator of educational success in the form of School Participation Numbers (APS) in the Bangka Belitung Islands Province in the 16-18 year age group has only reached 76.41%. The complexity of community problems in the Bangka Belitung Islands Province triggered a low APS especially in socio-economic problems. This research with quantitative descriptive method predicts the influence of the level of poverty on the APS. Besides the awareness of the people in Bangka Belitung for schools it has declined because in those years there was a booming Inkovental Tin Mine which was how easy it was to get money. Meanwhile, the lack of schools to reach rural communities greatly affects the level of the APS. The regression test results show that the poverty level has a significant negative effect of 55.33%. Increased poverty is followed by a decrease in APS and vice versa. Likewise the increase in the number of schools will be followed by an increase in the APS.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu Hak Warga Negara yang disediakan oleh pemerintah

demikian memperbaiki mutu masyarakat Indonesia yang merupakan Amanat UUD 1945 **Ayat 1:** Setiap warga negara berhak mendapat

pendidikan **Ayat 2:** Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Namun realitanya, masyarakat sendiri enggan mendukung sepenuhnya dalam mengupayakan perbaikan kualitas pendidikan (Qomar, 2012).

Maksud dari penelitian untuk mengetahui sejauhmana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 – 18 , Angka Partisipasi Kasar SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencari solusinya mengurangi kemiskinan untuk meningkatkan APS atau meningkatkan APS sehingga masyarakat mempunyai kemampuan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan (mengurangi kemiskinan).

2.1 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

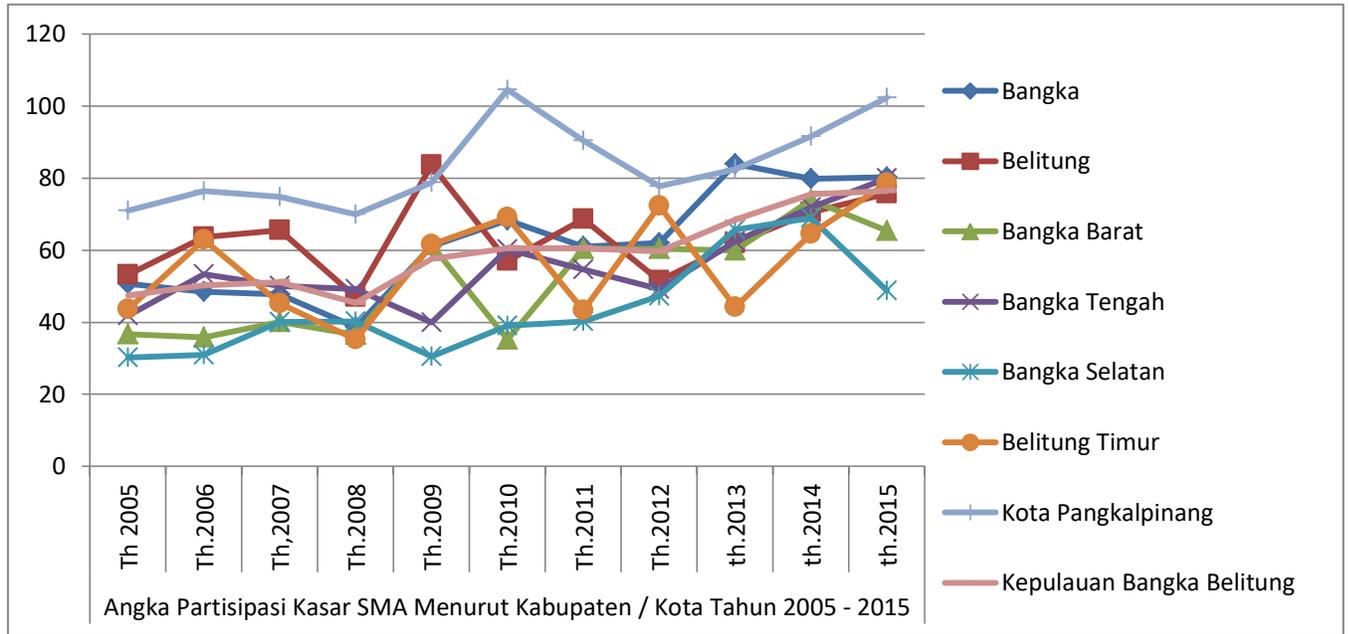
Tabel. 1 Angka Partisipasi Kasar SMA Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2005 - 2015

Kabupaten / Kota	Angka Partisipasi Kasar SMA Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2005 - 2015										
Kabupaten / Kota	Th 2005	Th. 2006	Th, 2007	Th 2008	Th .2009	Th .2010	Th. 2011	Th. 2012	th. 2013	th. 2014	th. 2015
Bangka	50,64	48,45	47,7	38,55	61,1	68,27	60,93	61,98	83,91	79,86	80,33
Belitung	53,24	63,64	65,6	46,95	83,65	56,99	68,59	51,54	61,92	70,62	75,65
Bangka Barat	36,68	35,75	40,03	36,61	61,44	35,18	60,43	60,36	59,95	73,98	65,46
Bangka Tengah	41,85	53,38	50,15	49,15	39,96	60,31	54,66	49,16	62,45	71,92	79,9
Bangka Selatan	30,18	30,93	40,01	40,29	30,56	39,03	40,18	47,33	65,71	68,9	48,81
Belitung Timur	43,68	62,9	45,18	35,25	61,56	69,07	43,27	72,29	44,22	64,5	78,59
Kota Pangkalpinang	70,99	76,39	74,81	70,03	78,81	104,54	90,35	77,72	82,51	91,57	102,39
Kepulauan Bangka Belitung	47,49	50,27	51,08	45,42	57,65	60,59	60,54	59,69	68,5	75,51	76,41

"Untuk ekonomi mikro, bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), memberikan pelatihan ketrampilan untuk berusaha, modal peralatan dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat," jelas Bambang

2. METODE PENELITIAN

Analisis data yang dipergunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisi data angka partisipasi kasar SMA, Angka Partisipasi sekolah 16-18 dan data tingkat kemiskinan



Gambar 1 . Grafik angka partisipasi kasar SMA menurut Kabupaten / Kota tahun 2005-2015

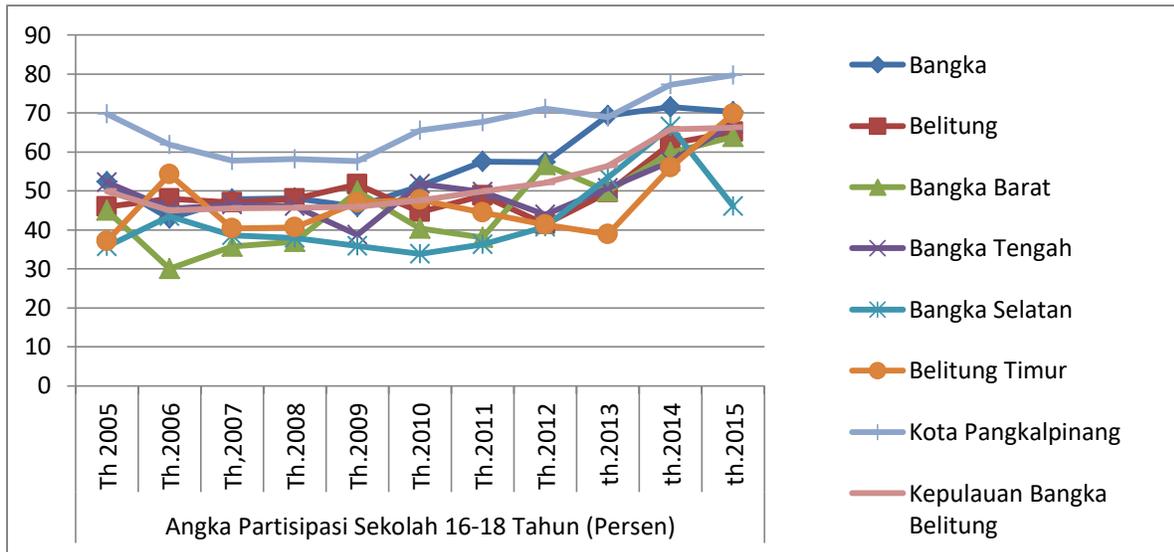
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi kasar SMA di Kabupen dan Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergambar bahwa Kota Pangkalpinang memiliki angka partisipasi kasar untuk tingkat SMA yang

paling tinggi dibanding Kabupaten lainnya, mencapai puncak pada tahun 2010. Untuk kabupaten Bangka selatan di bawah rata-rata provinsi Bangka Belitung.

Tabel. 2 Angka Partisipasi Sekolah 16 – 18 Kabupaten / Kota Tahun 2005 - 2015

Wilayah Babel	Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun (Persen)										
	Th 2005	Th.2006	Th,2007	Th.2008	Th.2009	Th.2010	Th.2011	Th.2012	th.2013	th.2014	Th .2015
Bangka	52,27	42,97	47,83	48,04	45,97	51,23	57,49	57,38	69,34	71,52	70,28
Belitung	45,89	48,02	46,96	47,92	51,58	44,61	48,76	41,38	49,62	62,14	65,06
Bangka Barat	45	30,03	35,78	36,92	49,9	40,28	38,05	56,69	49,91	59,76	63,94
Bangka Tengah	52,2	45,33	46,5	46,09	38,67	51,8	49,71	43,91	50,63	57,51	67,18
Bangka Selatan	35,72	43,49	38,59	37,88	35,92	33,77	36,22	40,76	53,38	66,45	46,01
Belitung Timur	37,02	54,22	40,29	40,66	47,07	47,63	44,38	41,35	38,83	55,94	69,78

Kota Pangkalpinang	69,75	61,81	57,78	58,14	57,63	65,55	67,72	71,15	68,89	77,27	79,67
Kepulauan Bangka Belitung	49,91	44,95	45,47	45,66	45,97	47,51	49,92	52,02	56,42	65,78	66,17



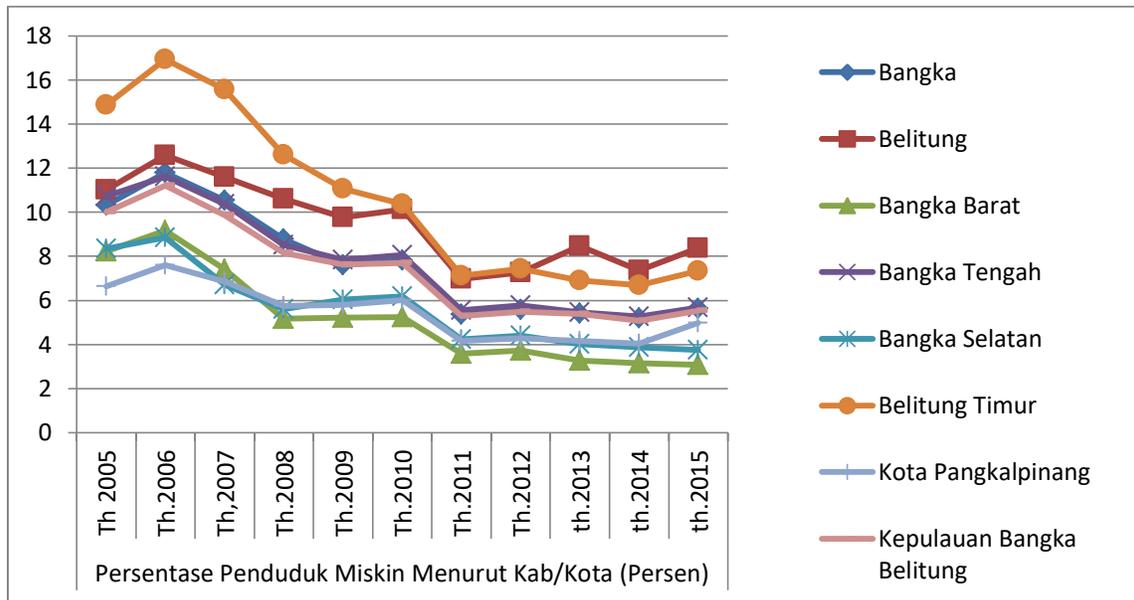
Gambar 2 . Grafik angka partisipasi Sekolah 16-18 tahun menurut Kabupaten / Kota tahun 2005-2015

APS usia 16-18 tahun Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 memiliki nilai dibawah 100%. Kota Pangkalpinang rata-rata memiliki presentase yang tinggi dibanding

Kabupaten lainnya. Kabupaten Bangka Selatan berada dibawah rata-rata provinsi Bangka Belitung. APS antar Kabupaten satu dengan kabupaten lain tidak begitu jauh perbedaan persentasenya.

Tabel. 3 Presentase penduduk miskin Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2005 - 2015

Wilayah Babel	Presentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota (Persen)										
	Th 2005	Th.2006	Th,2007	Th.2008	Th.2009	Th.2010	Th.2011	Th.2012	th.2013	th.2014	th.2015
Bangka	10,33	11,78	10,53	8,79	7,61	7,81	5,36	5,57	5,40	5,20	5,63
Belitung	11,01	12,59	11,59	10,62	9,78	10,13	6,97	7,26	8,48	7,36	8,38
Bangka Barat	8,22	9,17	7,41	5,18	5,22	5,25	3,59	3,72	3,26	3,15	3,08
Bangka Tengah	10,74	11,61	10,36	8,52	7,84	8,07	5,56	5,77	5,46	5,27	5,67
Bangka Selatan	8,34	8,86	6,71	5,60	6,04	6,19	4,23	4,40	4,01	3,87	3,74
Belitung Timur	14,87	16,94	15,58	12,61	11,07	10,36	7,13	7,43	6,90	6,68	7,33
Kota Pangkalpinang	6,63	7,60	6,85	5,74	5,79	6,02	4,15	4,29	4,15	4,04	4,97
Kepulauan Bangka Belitung	10,02	11,22	9,86	8,15	7,62	7,69	5,28	5,49	5,38	5,08	5,54



Gambar 3 . Grafik persentase Penduduk miskin menurut Kabupaten / Kota tahun 2005-2015

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 presentase rata-rata 7,40 %. Kabupaten Belitung Timur rata-rata memiliki presentase (10,63%) yang tinggi dibanding Kabupaten lainnya. Kabupaten Bangka Barat berada dibawah rata-rata provinsi Bangka Belitung. Jumlah penduduk miskin antar Kabupaten satu dengan kabupaten lain tidak begitu jauh perbedaan kecuali Belitung Timur yang awal paling tinggi tetapi pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan melampaui Kabupaten Belitung.

Pembahasan

Angka Partisipasi kasar SMA di Kabupen dan Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 2005 ada trend naik seiring dengan kesadaran orang tua dan Pemerintah Daerah untuk menyuksesken wajib belajar 12 tahun (PP No 47 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 4 dan 5 Peraturan

Daerah pada setiap daerah memungkinkan diatur menjadi wajib belajar 12 tahun). Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 (BPS Sumatera Selatan 73.18 %) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (76,41 %) sedikit baik. Sedangkan untuk rata-rata nasional Untuk mencapai (BPS Nasional 78.02 %). Untuk meningkatkan Angka Partisipasi kasar SMA maka perlu ditambahnya sarana dan prasarana sehingga dapat menampung semua lulusan SMP (sederajat).

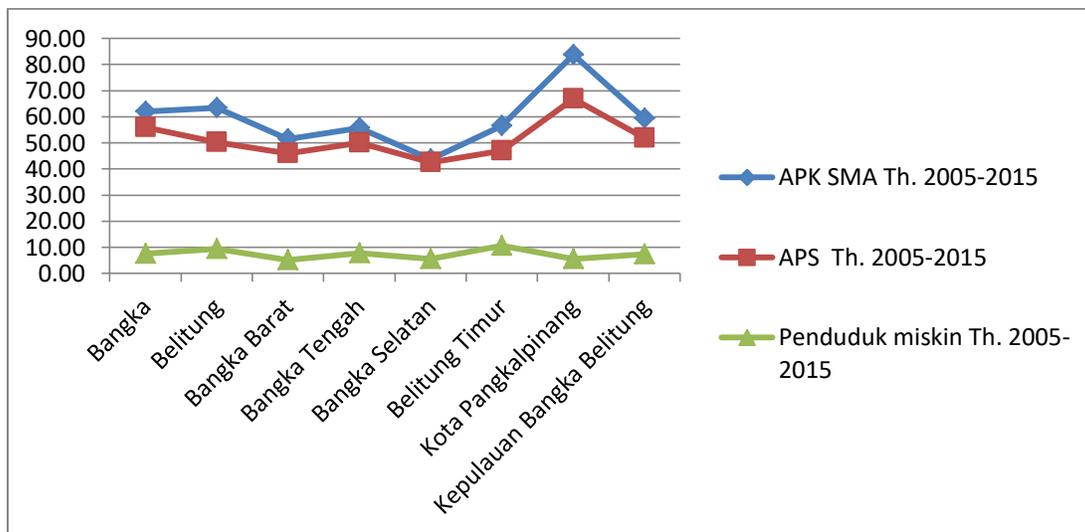
APS usia 16-18 tahun Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2005 sampai tahun 2015 memiliki nilai dibawah 100% hal ini menunjukkan masih banyak usia 16 – 18 tahun yang tidak sekolah dengan berbagai alasan (karena keterbasan data pendukung tidak dapat dijelaskan) walaupun setiap tahun ada peningkatan.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 presentase rata-rata 7,40 % menunjuk bahwa dari 100 orang diantaranya 7,4 orang masih hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 2011 rata-rata mengalami penurun di 7 Kabupaten / Kota. Kabupaten Bangka Barat menunjukkan trend selalu menurun presentasi kemiskinan.

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 7 Kabupaten / Kota yang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara variable angka partisipasi kasar SMA, Angka partisipasi sekolah usia 16 – 18 tahun dan presentase angka kemiskinan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel. 4 APK kasar SMA, APS 16-18 tahun Presentase penduduk miskin Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2005 - 2015

Wilayah Babel	APK SMA Th. 2005-2015	APS Th. 2005-2015	Penduduk miskin Th. 2005-2015
Bangka	61,97	55,85	7,64
Belitung	63,49	50,18	9,47
Bangka Barat	51,44	46,02	5,20
Bangka Tengah	55,72	49,96	7,72
Bangka Selatan	43,81	42,56	5,64
Belitung Timur	56,41	47,02	10,63
Kota Pangkalpinang	83,65	66,85	5,48
Kepulauan Bangka Belitung	59,38	51,80	7,40



R Square	0,33165
Adjusted R Square	0,06431
Standard Error	1,881851
Observations	8

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	2	8,786524	4,393262	1,240556	0,365182
Residual	5	17,70682	3,541364		
Total	7	26,49335			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	15,44482	6,208066	2,487863	0,055306	-0,51352	31,40316	0,51352	31,40316
X Variable 1	0,328175	0,219556	1,494719	0,195223	-0,23621	0,892561	0,23621	0,892561
X Variable 2	-0,53766	0,341581	-1,57404	0,176292	-1,41573	0,3404	1,41573	0,3404

Dari R Square di porelah angka 0,33165 yang artinya data tersebut kurang berhungan boleh dikatakan berlawanan. Semakin rendah tingkat kemiskinannya maka akan meningkat partisipasi kasar SMA, Angka partisipasi sekolah usia 16 – 18 tahun

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan 5 strategi untuk menekan jumlah kemiskinan di Indonesia. Untuk diketahui, pada Maret 2018 kemiskinan di Indonesia menurun jadi 9,82 persen atau mencakup 25,9 juta penduduk Indonesia. "Untuk terus menekan angka kemiskinan, pemerintah menyiapkan lima strategi. Pertama,

meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif," ujar

Bambang saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/7 2018).

Di tataran ekonomi makro, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal.

"Untuk ekonomi mikro, bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunal (BPNT), Bantuan

Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat," jelas Bambang.

Selanjutnya, untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan.

Langkah kedua untuk menekan jumlah kemiskinan, pemerintah akan memantapkan kelompok menengah ke bawah juga melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan.

"Selain itu, penguatan perekonomian Inspired middle Income class diwujudkan melalui kemudahan izin usaha bagi pemula, penguatan usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasi, serta peningkatan keahlian tenaga kerja dan sertifikasi keahlian,"

Selanjutnya langkah **ketiga** ialah melakukan reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan sejak 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi

ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, kesinambungan fiskal dan diversifikasi energi.

Sementara itu langkah **keempat** yaitu peningkatan anggaran perlindungan sosial. Pada periode 2010 hingga 2018, penurunan subsidi yang signifikan, dari 3,4 persen menjadi 0,8 persen PDB pada periode 2015 dan 2018 dialokasikan untuk perlindungan sosial melalui premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin serta perluasan program bantuan sosial. Pada 2018, anggaran yang cukup besar akan dialokasikan untuk infrastruktur dan investasi ekonomi. Terakhir langkah **kelima** yaitu melakukan penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat, mengingat implementasinya sering tidak sesuai dengan kebijakan pusat.

3. KESIMPULAN

Bertolak dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan sangat berhubungan dengan angka partisipasi kasar SMA, Angka partisipasi sekolah usia 16 – 18 tahun, semakin rendah tingkat kemiskinan akan semakin tinggi angka partisipasi.

Kota Pangkalpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi pioner angka partisipasi kasar SMA, Angka

partisipasi sekolah usia 16 – 18 tahun dan paling rendah presentase angka kemiskinannya.

Angka kemiskinan di Kabupaten Belitung timur pada tahun 2005 awalnya paling tinggi di Provinsi Bangka Belitung berjalan waktu mengalami penurunan bahkan pada tahun 2015 melampaui Kabupaten Belitung yang merupakan Induknya (Kabupaten Belitung Timur adalah pemekaran dari Kabupaten Belitung).

Di tataran ekonomi makro, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan [kerja](#) produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal.

"Untuk ekonomi mikro, bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan

Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat," jelas Bambang.

DAFTAR PUSTAKA

Amaliah, Deni. (2015). Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin. *Jurnal Ilmiah Kependidikan* 2 (3): 231—239

Badan Pusat Statistik Nasional

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BPS Provinsi Sumatera Selatan **Nirwana, I. D.** (2013). Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin: Studi pada 33 Provinsi di Indonesia, 6 Provinsi di Pulau Jawa dan 27 Provinsi di Luar Pulau Jawa pada Tahun 2006-2011. *Jurnal Ilmiah. Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*: 1—9

UNDANG – UNDANG

Sekretariat Negara RI. *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 2009.